

Noda merah kekuasaan orde baru dalam cerpen “Mei Hwa” karya Gunawan Budi Susanto

Ivo Trias Julianno *

Universitas Sanata Dharma

*Corresponding Author. E-mail: ivotrias.j@gmail.com

Received: August 13, 2023; Revised: January 10, 2024; Accepted: April 24, 2024

Abstrak: Karya sastra adalah representasi realitas yang ada di dalam dan di sekitar pengarang. Hal ini membuktikan bahwa sastra bukanlah sebuah teks yang kosong dan terpisah dari fenomena sosial-budaya yang terjadi di masyarakat. Ia mesti mengandung “didikan” yang berguna bagi para pembaca. Demikianlah makna adagium *dulce et utile* yang dilontarkan Horace. Meski mengurai banyak perdebatan ilmiah, tetapi dua kata di atas betul-betul mampu untuk menjawab makna kehadiran karya sastra di tengah masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk relasi kuasa yang terdapat dalam cerpen “Mei Hwa” karya Gunawan Budi Susanto. Penelitian ini juga membongkar citra rezim Orde Baru selama Reformasi Mei 1998 menggunakan konsep representasi sastra yang berdasar pada konteks historis di sekitar teks tersebut. Metode yang digunakan selama penelitian terbagi dalam tiga tahap, yakni metode pengumpulan data, metode analisis data, dan metode penyajian hasil analisis data. Data-data dikumpul dengan teknik baca-catat lalu dianalisis menggunakan metode analisis konten. Setelah itu, data-data disajikan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan teori relasi kekuasaan Michel Foucault, ditemukanlah ‘didikan’ yang dimaksud Horace dalam teks cerpen “Mei Hwa”. Data mengenai relasi kuasa yang terdapat dalam cerpen tersebut meliputi relasi kuasa yang bekerja atas pemikiran, meliputi manipulasi agama, kontrol bahasa, hingga stigmatisasi pada etnis Tionghoa, dan relasi kuasa yang bekerja atas tubuh, meliputi objektifikasi tubuh perempuan Tionghoa yang dijadikan hasrat seksual kaum lelaki hingga kontrol atas tubuh individu berdasarkan pada norma sosial yang berlaku. Dari keseluruhan hasil penelitian tersebut, ditemukanlah beberapa kesimpulan atas representasi Orde Baru dalam teks cerpen, yakni (1) negara Orde Baru menggunakan media agama, budaya, bahasa, hingga lembaga untuk melegitimasi kepentingan kekuasaannya di masyarakat, (2) negara Orde Baru menggunakan kekuatan politik identitas sebagai alat propagandanya dalam melanggengkan kekuasaan di Indonesia, dan (3) militer dan aparatur negara selaku instrumen kekuasaan memiliki peran penting dalam setiap peristiwa kelam yang terjadi di negeri ini.

Kata kunci: a representasi; relasi kuasa; Orde Baru; Tionghoa; Mei 1998

Abstract: Literary works are representations of realities that exist in and around the author. This proves that literature is not a text that is empty and separate from the socio-cultural phenomena that occur in society. It must contain ‘education’ that is useful for the readers. This is the meaning of Horace’s *dulce et utile* adage. Although there are many scientific debates, the two words above are really able to answer the meaning of the presence of literary works in society. This research aims to describe the form of power relations found in the short story “Mei Hwa” by Gunawan Budi Susanto. This research also exposes the image of the New Order regime during the May 1998 Reformation using the concept of literary representation based on the historical context surrounding the text. The method used during the research is divided into three stages, namely data collection method, data analysis method, and data analysis result presentation method. The data were collected using the read-and-record technique and then analyzed using the content analysis method. After that, the data is presented using the qualitative descriptive method. By using Michel Foucault’s theory of power relations, Horace’s ‘upbringing’ in the text of the short story “Mei Hwa” was found. Data on power relations contained in the short story include

power relations that work on thought, including religious manipulation, language control, to stigmatization of ethnic Chinese, and power relations that work on the body, including objectification of Chinese women's bodies that are used as sexual desires for men to control over individual bodies based on prevailing social norms. From the overall results of the research, several conclusions were found on the representation of the New Order in the short story texts, namely (1) the New Order state used the media of religion, culture, language, and institutions to legitimize its power interests in society, (2) the New Order state used the power of identity politics as a propaganda tool in perpetuating power in Indonesia, and (3) the military and state apparatus as instruments of power had an important role in every dark event that occurred in this country.

Keywords: representation; power relations; New Order; Tionghoa, May 1998

How to Cite: Julianno, I. T. (2024). Noda merah kekuasaan orde baru dalam cerpen “Mei Hwa” karya Gunawan Budi Susanto. *Sintesis*, 18(1), 15–37.
<https://doi.org/10.24071/sin.v18i1.7022>



Pendahuluan

Michel Foucault adalah seorang filsuf pascastrukturalis yang telah memberi banyak sumbangsih berupa ide dan gagasan penting dalam perkembangan pengetahuan manusia. Ia merupakan satu dari sekian pemikir barat yang hadir dengan corak pemikiran filsafat berbeda. Hal ini tampak dari gagasan-gagasannya yang cenderung memosisikan diri sebagai antitesis dari pola gagasan para pemikir sebelumnya. Beilharz (2005, h. 127) menyatakan bahwa upaya *decentring* yang dilakukan oleh Foucault merupakan representasi dari anti-humanisme filosofis yang diyakininya.

Salah satu pemikiran terpenting yang digagas Foucault adalah teori kekuasaan. Foucault memandang kekuasaan sebagai bentuk yang berbeda dari pandangan kaum Marxis. Meski implisit atau eksplisit, Foucault sering menyebut Marxisme, tetapi menurutnya analisa Marxisme tentang kuasa karena pelbagai alasan tidak memuaskan (Bertens, 2001, h. 319). Asal-usul intelektualnya, dengan demikian, terutama bersumber dari pembacaan kembali atas filsafat barat serta kritik terhadap antroposentrisme filsafat itu sebagaimana yang dilancarkan oleh pemikiran Nietzsche dan Heidegger (Beilharz, 2005, hh. 127—128). Dari paparan tersebut, tampak Foucault memang berupaya untuk tidak terjebak dalam pola-pola pemikiran filsuf pada umumnya. Upaya *decentring* tersebut, setidaknya diuraikan cukup jelas oleh Beilharz (2005) ke dalam tiga corak pemikiran Foucault berikut.

Pertama, ia lebih tertarik untuk mengeksplorasi praktik-praktik diskursif serta wujud-wujud kekuasaan yang membentuk subjek ketimbang menyusun teori tentang subjektivitas konstitutif. Kedua, ia lebih percaya untuk menggagas teori tentang rezim kebenaran dan kekuasaan ketimbang mengembangkan teori logis tentang kebenaran itu sendiri. Ketiga, ia lebih berhasrat untuk mengungkap bahwa sejarah selalu ditandai oleh diskontinuitas diskursif dan relasi kekuasaan-pengetahuan.

Haryatmoko (2016, h. 15) menyatakan kekuasaan bagi Foucault bukan sebagai hubungan subjektif searah dengan kemampuan individu atau kelompok untuk memaksakan kehendak kepada yang lain, melainkan semacam strategi kompleks dalam suatu masyarakat dengan perlengkapan, manuver, teknik, dan mekanisme tertentu. Secara tidak langsung, kuasa dapat diartikan sebagai suatu mekanisme yang tidak dimiliki, tetapi dipraktikkan dalam suatu ruang lingkup dengan banyak posisi yang secara strategis berkaitan satu sama lain dan senantiasa mengalami penggeseran (Bertens, 2001, h. 320).

Kamahi (2017, h. 120) menyatakan bahwa bagi Foucault kekuasaan itu bersifat tersebar, berada di mana-mana (*omnipresent*), dan imanen terdapat dalam setiap relasi sosial. Hal ini

bukan karena kekuasaan memiliki kemampuan mengkonsolidasikan segala sesuatu di bawah kondisi ketidaktampakannya, melainkan karena kekuasaan selalu diproduksi dalam setiap momen dan setiap relasi di kehidupan.

Praktik-praktik, mekanisme-mekanisme, atau strategi kuasa yang terjadi di suatu masyarakat, secara tidak langsung menciptakan sejarah tentang corak zaman pada waktu itu. Dalam teorinya, Foucault memberi satu gambaran bahwa sistem pemikiran dan pengetahuan yang berlaku di suatu tatanan masyarakat bukanlah sebuah peristiwa alamiah, melainkan hasil dari manuver kekuasaan (sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan) yang dilancarkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Manuver inilah yang kemudian menciptakan corak kehidupan suatu zaman. Sistem pemikiran ini oleh Foucault disebut *episteme* (Bertens, 2001: 314).

Pemaknaan tersebut sejalan dengan salah satu pendekatan karya sastra, yakni memandangnya sebagai dokumen sosial (kenyataan sosial) sehingga banyak ditemukan gambaran tentang corak suatu zaman terepresentasikan dalam teks sastra. Faktor-faktor sejarah dan lingkungan memang bisa dianggap ikut membentuk karya sastra (Wellek dan Warren, 2016, h. 72). Hal ini semakin memperjelas bahwa ada keterkaitan erat antara kemunculan karya sastra dengan sejarah yang terjadi di zamannya, sebab sebagai dokumen sosial, sastra dipakai untuk menguraikan ikhtisar sejarah sosial (Wellek dan Warren, 2016, h. 110).

Sebagai satu praksis sosial-ideologis, karya sastra diletakkan dalam satu kerangka representasi tentang dan dalam kehidupan. Teori ini memiliki dan memberikan kepekaan yang tinggi terhadap masalah-masalah stagnasi, tradisi, konflik dalam masyarakat, dan bagaimana praktik kekuasaan (politik) dioperasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Teori ini juga memberikan perhatian cara "membongkar" karya sastra sebagai bagian dan satu hegemoni kekuasaan sehingga masalah "Apa yang dikeluarkan (ekslusi)?" dan "Apa yang dimasukkan (inklusi)?" sebuah karya sastra secara langsung berhubungan dengan konteks sosial dan politik masyarakat, yakni tempat karya sastra tersebut hadir (Antomo, 2013: 19-20).

Cerpen merupakan karya fiksi yang dapat dinikmati sebagai suatu realitas artifisial dalam teks. Sementara fiksi dalam konteks sastra adalah sebuah rekaan yang menawarkan model-model kehidupan dengan sesuatu yang diidealkan oleh pengarang sekaligus menunjukkan sosoknya sebagai karya seni yang berunsur estetik dominan. Fiksi menceritakan berbagai masalah kehidupan manusia dalam interaksinya dengan lingkungan dan sesama, interaksinya dengan diri sendiri, serta interaksinya dengan Tuhan (Nurgiyantoro, 2002, h. 3).

Meski karya fiksi berisi realitas, perlu ditekankan bahwa kebenaran dalam dunia fiksi adalah kebenaran yang sesuai dengan keyakinan pengarang, kebenaran yang telah diyakini (keabsahannya) sesuai dengan pandangannya terhadap masalah hidup dan kehidupan (Nurgiyantoro, 2002: 5). Artinya, dunia yang ditawarkan dalam teks sastra adalah dunia ideal (tiruan atau rekaan) dan kebenaran di dalamnya merupakan pokok pandangan atau kepercayaan pengarang. Dua objek ini tentu tidak bisa dilepaskan dari latar biografis pengarang karena selalu ada kesamaan tidak langsung antara karya dan pengarangnya. Meski suatu karya sastra mengalami konvensi yang didramatisasi oleh pengarang, tetapi konvensi yang dipakai jelas berdasarkan pengalaman dan hidupnya sendiri (Wellek dan Warren, 2016, h. 79). Sastrawan memberi makna lewat kenyataan yang dapat diciptakannya dengan bebas, asal tetap dapat dipahami oleh pembaca dalam rangka konvensi yang tersedia baginya: konvensi bahasa, konvensi sosio-budaya, dan konvensi sastra (Teeuw, 2017, h. 189).

Aspek-aspek tersebut tercermin dalam karya-karya Gunawan Budi Susanto, seorang pengarang yang selalu membawa kisah biografisnya sebagai anak korban Tragedi 1965 dalam

karya sastranya. Di sisi lain, gugatan yang dilakukan Gunawan Budi Susanto dalam teks sastra telah membuktikan bahwa Sastra Indonesia bukan sekadar karya-karya imajinatif untuk hiburan belaka atau sebagai bacaan pengisi waktu luang, melainkan sebuah alat yang dapat digunakan untuk merepresentasi dan mengkonstruksi dinamika pemikiran, pergulatan hidup, hingga peristiwa sosial yang dialami manusia Indonesia.

Penjagal Itu Telah Mati (2015), selanjutnya disingkat *PITM*, karya Gunawan Budi Susanto merupakan kumpulan cerpen kedua yang diciptakannya sekaligus dianalisis pada penelitian ini. Kumpulan cerpen *PITM* terbitan PATABA Press tersebut memuat 14 cerpen, yakni "Di Kubur Manakah Kautemukan Tubuhku", "Penjagal Itu Telah Mati", "Ibu Terus-menerus Bungkam", "Aku Belum Tahu di Mana Kubur Bapak", "Tamu dari Masa Lalu", "Mei Hwa", "Penembang Malam", "Jembatan Merah", "Akhirnya Om Bandrio pun Bicara", "Luka Itu Terperam Dalam-dalam", "Calon Mertuaku Ingin Jadi Burung", "Percakapan Kakek dan Cucu Terkasih", "Sudahi Saja Kisah Lapuk Itu", dan "Tak Kaudengarkan Suara Moetiah".

Dari semua cerpen yang termuat dalam kumpulan cerpen *PITM* karya Gunawan Budi Susanto, penulis hanya memakai satu cerpen berjudul "Mei Hwa". Adapun hal-hal yang melatarbelakangi penulis memilih cerpen ini, yakni (1) cerpen "Mei Hwa" dalam kumpulan cerpen ini belum pernah diteliti menggunakan teori kekuasaan Michel Foucault, sehingga penulis memiliki keleluasaan untuk menganalisis isinya, (2) konflik dan latar peristiwa dalam cerpen ini memiliki kesamaan historis dengan peristiwa Reformasi Mei 1998 di masa penggulingan Orde Baru, dan (3) sebagian kisah yang ada di kumpulan cerpen ini merupakan bagian dari pengalaman empiris pengarang yang dapat dikatakan telah mewakili nasib masyarakat lainnya sebagai korban dari politik kekuasaan rezim.

Dari ketiga cerpen yang dikaji, terdapat dua peristiwa sejarah penting yang menjadi fondasi dalam alur cerita. Pertama, peristiwa pembantaian massal 1965 dalam sejarah kelam bangsa Indonesia. Tragedi ini merupakan penanda dari kemunculan rezim Orde Baru yang dikomandoi Soeharto. Peristiwa berdarah ini menjadikan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan orang-orang yang dituduh terlibat pada kaum komunis sebagai target pembunuhan karena dianggap memberontak hingga membahayakan kedaulatan negara. Kedua, peristiwa krisis moneter yang terjadi sejak Juli 1997 di Asia dan mengakibatkan sederet aksi kerusuhan di masa Orde Baru sampai puncaknya pada Reformasi Mei 1998.

Dua peristiwa sejarah inilah yang menjadi representasi rezim Orde Baru dalam teks cerita. Penggambaran sikap Orde Baru dicitrakan melalui diksi, kalimat, dialog antartokoh, dan narasi penulis dalam alur cerita sehingga menarik penulis untuk membongkar apa saja bentuk relasi kuasa yang dilakukan Orde Baru terhadap masyarakat dalam dua babak sejarah kelam bangsa Indonesia yang tersaji dalam cerpen "Penjagal Itu Telah Mati", "Jembatan Merah", dan "Mei Hwa" karya Gunawan Budi Susanto.

Kajian Pustaka

Dalam memandang kekuasaan, karya pemikiran Foucault adalah jawaban atas persoalan bagaimana dan mengapa formasi-formasi diskursif berubah (Beilharz, 2005, h. 128). Mengacu pada uraian tersebut, tampak corak pemahaman Foucault mengenai sesuatu yang dimaksud dengan kekuasaan. Setidak-tidaknya, dapat dikatakan bahwa Foucault hadir dengan satu manifestasi pemikiran orisinal mengenai kekuasaan yang selama ini memunculkan perdebatan.

Foucault telah menggeser paradigma tentang pemaknaan kekuasaan yang cenderung bersifat vertikal atau objek yang menindas kepada subjek yang tertindas sebagaimana pandangan kaum Marxis selama ini. Baginya, pembentukan individu yang berdisiplin, dalam masyarakat modern, tidak hanya dilakukan oleh lembaga-lembaga represif (penjara, polisi),

tetapi juga dalam interaksi masyarakat dan semua bentuk kegiatan sosial (Haryatmoko, 2016, h. 9).

Relasi Kuasa dan Produksi Wacana

Secara umum, pemaknaan relasi kekuasaan selalu berkaitan dengan perjuangan, melibatkan satu kelompok dengan kelompok yang lain dalam beberapa variasi: kelas atas-kelas bawah, perempuan-laki-laki, hitam-putih, muda-tua, dan sebagainya (Adji, 2019, h. 3). Namun, Sulistya dkk. (Wasesa, 2013, h. 16) menyatakan bahwa menurut Foucault, relasi kuasa adalah sesuatu hal yang mampu membuat orang-orang menjadi patuh tanpa melalui sentuhan fisik dan semacamnya. Relasi kuasa merupakan konsep hubungan kekuasaan, yakni praktik-praktik kekuasaan dari subjek pada objek melalui berbagai media dan rupa.

Pandangan mengenai otonomi kebudayaan dalam kaitannya dengan koherensi internal di dalam formasi-formasi diskursif akhirnya tergusur seiring dengan bergesernya penekanan menuju "relasi kekuasaan" sebagai sendi terpenting. Ini lantas menjadikan pengetahuan sebagai situs bagi strategi, pergulatan, dan konflik demi kekuasaan (Beilharz, 2005, h. 128). Ketika relasi kekuasaan dijalankan terus-menerus, maka terbentuklah sebuah *episteme* baru di lingkup masyarakat dan membuat masing-masing individu kehilangan ruang untuk menentukan keputusan-keputusan di hidupnya.

Praktik Kuasa atas Pemikiran

Haryatmoko (2016, h. 16) menyatakan bahwa dalam pandangan Foucault, kekuasaan lebih berbentuk sesuatu yang produktif, tempat setiap orang turut ambil bagian dan ia menghasilkan realitas. Hal ini berarti kekuasaan tidak sekadar menghasilkan dampak negatif berupa penindasan, pembungkaman, dan sebagainya.

Seperti dikatakan sendiri oleh Foucault bahwa ada teknik tertentu untuk membentuk individu melalui pengetahuan. Individu memang hasil representasi ideologis masyarakat, tetapi individu juga merupakan realitas yang diciptakan oleh teknologi kekuasaan dan disiplin (Haryatmoko, 2016, h. 16).

Haryatmoko (2016, h. 17) menyatakan bahwa dalam masyarakat modern, semua tempat berlangsungnya kekuasaan juga menjadi tempat pembentukan pengetahuan tentang kegilaan, seksualitas, dan produksi. Ia menegaskan jika fenomena kegilaan telah menjadi lahan subur bagi perkembangan ilmu psikiatri, psikologi, dan kedokteran; sedangkan seks merupakan sumber berkembangnya ilmu psikoanalisa, psikologi, kedokteran, kriminologi, etika, bahkan teologi. Sementara produksi telah mendorong perkembangan ilmu ekonomi, sosiologi, dan psikologi.

Demikian sebaliknya, semua pengetahuan memungkinkan dan menjamin beroperasinya kekuasaan. Kehendak untuk mengetahui menjadi proses dominasi terhadap objek-objek dan terhadap manusia. Pengetahuan adalah cara kekuasaan memaksakan diri kepada subjek tanpa memberi kesan bahwa ia datang dari subjek tertentu, karena kriteria keilmiahannya seakan-akan mandiri terhadap subjek. Padahal klaim ini merupakan bagian dari strategi kekuasaan (Haryatmoko, 2016, h. 17).

Syafiuddin (2018, h. 149) menyatakan bahwa Foucault telah melakukan distingsi terhadap formasi-formasi diskursif dengan formasi nondiskursif. Mutasi penyebaran formasi diskursif dipandang sebagai proses independen dari formasi nondiskursif seperti institusi. Ia juga menegaskan bahwa genealogi Foucault berusaha memperlihatkan bagaimana relasi-relasi kekuasaan dan pengetahuan berjalan untuk menguasai, mengontrol, serta menundukkan tubuh manusia-manusia modern Eropa hingga seperti yang terjadi sekarang.

Jadi pada tahap ini Foucault berusaha mendudukkan antara kekuasaan dan diskursus. Ia ingin mengupas tentang bagaimana tubuh manusia meregulasi diri, mengontrol diri di bawah kendali kekuasaan yang direpresentasikan oleh pengetahuan yang diamini kebenarannya. Kesadaran demikian membuat manusia mampu untuk memahami dan memegang kendali atas dirinya sendiri terhadap segala jenis praktik kekuasaan yang ditujukan kepadanya.

Teks Sastra dan Representasi Sejarah

Taum (2015, h. 29) menyatakan bahwa masalah hubungan antara karya sastra dengan aspek-aspek kenyataan (seperti tempat, waktu, peristiwa, orang) merupakan persoalan yang disebut representasi sastra (*literary representation*). Karya sastra adalah sebuah dunia baru yang coba dihadirkan oleh pengarang berdasarkan pada peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam realitas. Pandangan demikian sesuai dengan prinsip pendekatan mimetik yang menganggap karya sastra sebagai refleksitas atau cerminan dari kenyataan. Menurut pandangan mimetik, yang primer dan utama adalah realitas karena realitas hadir mendahului karya sastra. Proses representasi menurut kaum mimetik merupakan sebuah proses pasif di mana seorang pengarang berupaya menghadirkan kenyataan dalam karya sastranya (Taum, 2015, h. 30).

Sastra dan realitas memang dua entitas yang berkaitan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Teeuw (2017, h. 175) bahwa hubungan itu selalu merupakan interaksi yang kompleks dan tak langsung yang ditentukan oleh tiga macam saringan kelir, yakni kelir konvensi bahasa, kelir konvensi sosio-budaya, dan kelir konvensi sastra yang menyaring, menentukan kesan, lalu mengarahkan pengamatan dan penafsiran pembaca terhadap kenyataan.

Mengacu pada uraian Teeuw mengenai konektivitas antara sastra dan realitas, maka dapat dipahami bahwa dunia dalam teks sastra merupakan representasi dari peristiwa sejarah. Sastra merepresentasikan bagaimana kondisi sosial, budaya, dan politik suatu *episteme* melalui medium bahasa sehingga melalui teks sastra kita dapat memahami citraan-citraan sejarah di dalamnya.

Seperti yang dinyatakan Wellek dan Warren (2016, h. 72) bahwa faktor-faktor sejarah dan lingkungan memang bisa dianggap ikut membentuk karya sastra. Namun, keduanya pun menekankan bahwa dalam menilai teks sastra tersebut, sejauh mana faktor-faktor luar tadi dianggap menentukan produksi karya sastra dan sejauh mana metode ekstrinsik dianggap mampu mengukur pengaruh luar tersebut, tergantung dari pendekatan yang dipakai (Wellek dan Warren, 2016, h. 73).

Metode

Pada tahap pengumpulan data, penulis menggunakan metode studi pustaka. Menurut Nazir (1988), studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Data yang digunakan ada dua sumber, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh langsung dari cerpen "Mei Hwa" dalam kumpulan cerpen *PITM* karya Gunawan Budi Susanto yang diterbitkan oleh Pataba Press pada 2015.

Sumber data sekunder adalah data penulisan dan penelitian yang diperoleh dari pustaka-pustaka, seperti kajian tentang kumpulan cerpen *PITM*, literatur tentang pemikiran Michel Foucault, dan literatur tentang peristiwa sejarah di masa rezim Orde Baru. Data-data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan teknik baca-catat, yakni teknik mencatat poin-poin bacaan yang dianggap penting dan relevan dengan penelitian yang dilakukan.

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah analisis data. Pada tataran ini digunakan metode analisis isi/analisis konten. Metode ini digunakan untuk mencapai taraf arti dan makna yang terdapat dalam karya sastra. Dengan metode ini, penulis mengkaji bentuk relasi kuasa yang disampaikan pengarang pada cerpen “Mei Hwa” dalam kumpulan cerpen *PITM* dan relevansinya pada peristiwa Reformasi Mei 1998 di masa pengujung Orde Baru.

Tahap terakhir adalah menyajikan hasil analisis data. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Menurut Nazir (1988), metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuannya adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau narasi yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan peristiwa yang diteliti.

Isi dari deskripsi adalah hasil analisis penulis tentang bentuk relasi kuasa pada cerpen “Mei Hwa” dalam kumpulan cerpen *PITM* karya Gunawan Budi Susanto dan relevansinya pada peristiwa Reformasi Mei 1998 di masa pengujung Orde Baru.

Hasil dan Pembahasan

Relasi Kuasa atas Pemikiran dalam Cerpen “Mei Hwa”

Bentuk-bentuk relasi kuasa atas pemikiran yang ditemukan dalam cerpen “Mei Hwa” adalah manipulasi, dogma, hegemoni, stigmatisasi, politik identitas, dan kontrol. Enam bentuk relasi kuasa tersebut hadir melalui wacana agama, wacana lembaga, dan wacana bahasa. Berikut penjelasannya.

Wacana Agama

Dalam cerpen “Mei Hwa” karya Gunawan Budi Susanto, ditemukan dua wacana agama sebagai media relasi kuasa berupa manipulasi dan dogma atas pemikiran masyarakat. Pada konteks cerpen, tokoh Mei Hwa digambarkan sebagai salah satu karakter yang pada akhirnya menyerahkan diri kepada gereja sebagai jalan untuk mendamaikan diri dari peristiwa tragis yang terjadi di masa lalunya.

Aku *njujug* ke gereja. Aku ceritakan apa yang terjadi. Gereja mencarikan tempat bagiku untuk bisa tinggal dan mengabdikan diri bagi kerja kemanusiaan. Dan, kau masih bertanya apakah aku sudah kehilangan kepercayaan dan keyakinan soal Tuhan atau tidak! (Susanto, 2015, hh. 60—61).

Narasi di atas adalah penggalan cerita Mei Hwa kepada tokoh Aku tentang perjalanan spiritualnya. Sebagai korban pemerkosaan massal pada peristiwa 1998, ia merasa dirinya begitu dihina dan direndahkan martabatnya sebagai perempuan dan manusia. Ia kehilangan kepercayaan pada manusia. Akhirnya, jalan terakhir yang dipilihnya adalah gereja. Di gereja ia merasa mendapat tempat tinggal, ketenangan, dan perlindungan. Di sini, tampak bagaimana agama memanipulasi pemikiran manusia untuk menjadikan agama sebagai jalan ketenangan, kedamaian, dan kehidupan baru. Manusia beragama akan menyerahkan diri sepenuhnya berdasarkan pada ajaran-ajaran agama yang dianutnya.

Relasi kuasa lain yang terjadi dalam teks cerpen adalah dogma agama. Dogma tersebut kerap mengesampingkan gugatan batin dan ketidakterimaan manusia seperti yang dirasakan Mei Hwa.

Aku tak pernah bisa menjawab pertanyaan itu. Tak ada siapa pun bisa kutanya. Kalaupun ada orang di gereja, misalnya, bisa menjawab, pasti tak bakal mau menjawab. Dia pasti mengingatkan aku untuk memberikan pengampunan. Namun, pada siapa pula pengampunan itu mesti kutujukan? (Susanto, 2015, h. 62).

Narasi di atas adalah ungkapan batin Mei Hwa ketika pikirannya berupaya untuk menemukan jawaban tentang dendam, amarah, dan kebencian atas pemerkosaan massal yang dialaminya pada peristiwa 1998 di Jakarta. Mei Hwa sadar ketika perasaan itu diceritakannya pada orang-orang atau rohaniawan gereja, semuanya akan selalu mengarahkannya pada sikap pengampunan seperti yang diajarkan gereja. Namun, jika pun pengampunan itu dilakukan, kepada siapa pula itu diberikan sebab sampai saat itu Mei Hwa tak mengetahui sedikit pun informasi mengenai para pelaku yang memerkosanya secara massal.

Dogma demikian adalah bentuk relasi kuasa atas pemikiran yang terjadi terhadap Mei Hwa. Gugatannya tentang keadilan tidak menemukan jalan terang dalam ruang agama. Ia tak bisa menemukan para pelaku pemerkosa massal yang telah menghancurkan kehidupannya. Akhirnya, Mei Hwa hidup dalam kedilemaan antara mencari keadilan atau berpasrah pada ajaran gereja untuk mengampuni dan memaafkan peristiwa tragis tersebut.

Wacana Lembaga

Pada cerpen "Mei Hwa" karya Gunawan Budi Susanto, ditemukan juga bentuk relasi kuasa atas pemikiran yang terjadi di masyarakat melalui lembaga-lembaga. Dalam teks cerpen, lembaga-lembaga tersebut terepresentasikan oleh oknum-oknum atau organisasi masyarakat itu sendiri.

Bentuk relasi kuasa pertama berupa hegemoni yang dilakukan melalui eksekusi korban seperti yang ditunjukkan pada kutipan berikut.

Saya mencari-cari tempat paling tinggi, mengatasi tinggi tubuh yang baru sepaha orang-orang dewasa untuk melihat apa yang terjadi. Orang-orang berseru ah-oh-ah-oh ketika melihat mayat terhanyut olakan air bengawan. Namun seruan itu menghilang ketika ternyata belasan, seolah-olah tak habis-habis. Itu bukan orang *kalap*! . . . (Susanto, 2015, h. 51).

Narasi di atas adalah kisah masa kecil tokoh Aku di kampungnya. Ia dan warga kampung dikagetkan oleh mayat yang hanyut di bengawan dekat kampungnya. Kekagetan itu lantas berubah jadi ketakutan ketika mayat-mayat lainnya bermunculan di bengawan tersebut. Di situlah warga kampung yakin jika peristiwa itu bukanlah peristiwa tenggelam pada umumnya. Setelah menyadari hal tersebut, tampak suatu narasi tokoh Aku yang menyatakan reaksi masyarakat:

... Itu bukan orang tenggelam atau terhanyut. Bukan! Itu... ah, entah apa namanya, saat itu saya tak tahu. Saya hanya tahu, semua orang yang berjajar di tepian bengawan sembari melongokkan kepala tinggi-tinggi terdiam. Tak ada suara. Senyap. (Susanto, 2015, h. 51).

Artinya, pikiran masyarakat telah terbungkam dan terkontrol untuk tidak membicarakan dan memikirkan sebab-musabab peristiwa yang disaksikan. Ada sebuah ruang hegemoni yang telah menyiratkan suatu pesan pembunuhan serupa yang sewaktu-waktu dapat menimpa

kampung tersebut. Rasa ketakutan yang hadir sebagai reaksi masyarakat atas peristiwa tersebut merupakan efek dari relasi kuasa yang bekerja terhadap pemikiran masyarakat.

Selain itu, bentuk relasi kuasa atas pikiran lainnya berupa manipulasi dan stigmatisasi pada suatu identitas tertentu. Dalam konteks cerpen "Mei Hwa", identitas yang dijadikan objek stigma komunisme adalah Engkong Mei Hwa.

... Di hutan-hutan, di kampung, di sawah, di ladang, di huma bertebaran kuburan. Siapa mengubur, siapa dikubur, tak jelas. Keluargaku tak tahu kenapa dan di mana *Engkong* dibunuh dan dikubur. Kata Papi, suatu malam puluhan orang entah dari mana datang dan menggedor-gedor rumah kami. Ketika membuka pintu, *Engkong* langsung diseret dan diarak, entah ke mana. Sejak saat itu, kata Papi, *Engkong* tak lagi pulang. Tak ada kabar apa pun dari siapa pun. Keluargaku cerai-berai," tutur Mei Hwa nyaris datar. (Susanto, 2015, h. 53).

Dari narasi di atas, tampak bagaimana Papi Mei Hwa pernah menceritakan kisah penangkapan Engkong-nya pasca G-30-S. Sebagai keturunan Tionghoa, *Engkong* Mei Hwa diperlakukan seperti seorang yang berdosa dan berbahaya karena stigma komunis yang dilekatkan pada etnis Tionghoa di masa itu. Stigma demikian lantas membuat masyarakat berbuat sewenang-wenang dengan menyisir orang-orang yang diduga PKI, sebagaimana Engkong Mei Hwa, lalu menangkap, menyeret, mengarak, dan membunuhnya.

Jika mengacu pada pemikiran Foucault, ada praktik manipulasi dan stigmatisasi atas pikiran "puluhan orang entah dari mana" sebagai representasi dari masyarakat dalam konteks cerpen di atas. Manipulasi yang dimaksud adalah wacana yang beredar dan mengklaim bahwa etnis Tionghoa bersama PKI menjadi dalang di balik G-30-S sehingga semuanya wajib ditumpaskan.

Stigma komunis pada masa Orde Baru tidak hanya terjadi pada masyarakat keturunan Tionghoa saja. Masyarakat lainnya juga mendapat perlakuan yang serupa, terutama yang memiliki kedekatan dengan orang-orang PKI, entah sebatas kenal atau kerabat.

Sekilas ingatkanku melejing ke peristiwa saat kami—Ibu, saya, dan keempat saudara saya—tergopoh-gopoh seperti maling menyelinap pergi dari rumah kami di Cepu untuk boyongan ke rumah Nenek di Blora dengan hanya berbekal pakaian sekadarnya, setelah muncul kabar Bapak ditelan ular raksasa buruk rupa dan bau bacin, lalu dimuntahkan sebagai bangkai entah di mana. Duh, Gusti, kenapa setiap kali keperihan itu masih terasa! Dan dendam itu, kenapa tak luruh atau menguap dan melenyap? (Susanto, 2015, h. 57).

Kutipan di atas merupakan cerita yang diungkapkan tokoh Aku mengenai kehidupan keluarganya pasca 1965. Ia mengenang masa kecilnya bersama Ibu dan empat saudaranya yang mesti melarikan diri dari rumahnya di Cepu ke rumah neneknya di Blora. Pelarian ini dimaksudkan untuk menyelamatkan diri setelah mendapati kabar bahwa bapaknya turut menjadi korban pembunuhan di kampungnya.

Artinya, keluarga tokoh Aku juga mendapat stigma sebagai bagian dari komunis di kampungnya dan masyarakat melakukan eksekusi sebagaimana yang diperintahkan oleh rezim melalui militer. Dalam konteks tersebut, masyarakat yang turut menjadi algojo di kampung tokoh Aku telah termanipulasi oleh praktik relasi kuasa yang dilakukan pemerintah pasca 1965.

Hal lainnya merujuk pada peristiwa Mei 1998. Dalam cerpen "Mei Hwa" karya Gunawan Budi Susanto, tokoh Mei Hwa merupakan karakter yang dalam riwayat keluarganya menjadi korban

politik identitas di masa Orde Baru. Jika sebelumnya, si *Engkong* yang menjadi korban politik identitas pasca 1965, pada konteks ini Mei Hwa sendirilah yang menjadi korban.

Aku tinggal di apartemen, tak jauh dari kantor perusahaan tempatku bekerja. Bukan apartemen mewah. Namun justru itulah yang kelak kusesali. Lantaran tingkat pengamanan dan keamanan yang tak ketat, apalagi mayoritas penghuni sesama mata sipit, bencana jadi begitu mudah menghampiri kami. Penyesalan lebih besar, kenapa saat itu aku begitu bebal, tak mau pindah sementara ke rumah Papi dan Mami yang tinggal di kampung. (Susanto, 2015, h. 58).

Dari narasi di atas Mei Hwa mengisahkan pengalaman pahitnya ketika masih hidup di Jakarta. Di sana ia tinggal di sebuah apartemen yang secara mayoritas dihuni oleh etnis Tionghoa. Pada masa pergolakan politik 1998, sederet peristiwa terjadi di tanah air, mulai dari demonstrasi besar-besaran, kerusuhan, pembakaran, hingga paling keji, yakni pemerkosaan massal terhadap perempuan Tionghoa.

Dalam narasi Mei Hwa yang mengatakan "...apalagi mayoritas penghuni sesama mata sipit, bencana jadi begitu mudah menghampiri kami...", terlihat adanya suatu stereotipe identitas yang kembali dibangkitkan di masa itu. Pemikiran masyarakat kembali dikontrol oleh suatu relasi kuasa untuk mengobjektifikasi antara orang Tionghoa dan non-Tionghoa. Seperti yang dikatakan Mei Hwa, hal tersebut lantas menjadi ruang legitimasi untuk oknum-oknum melakukan perbuatan yang tidak manusiawi terhadap orang-orang Tionghoa.

Sebagaimana yang diungkapkan Izzat (2018) dalam tulisannya bahwa pada kerusuhan rasial yang terjadi menjelang runtuhnya Orde Baru, terjadi persekusi dan pembantaian terhadap etnis Tionghoa, pemerkosaan wanita Tionghoa, serta penjarahan dan pembakaran toko-toko Tionghoa, yang dikenal sebagai peristiwa Mei Kelabu.

Wacana Bahasa

Pada cerpen "Mei Hwa" karya Gunawan Budi Susanto, terdapat juga relasi kuasa atas pikiran yang terjadi melalui wacana bahasa dan berdampak pada pengontrolan pikiran masyarakat. Berbeda dari wacana bahasa yang terdapat pada dua cerpen sebelumnya, pada cerpen "Mei Hwa" wacana bahasa yang berlaku di masyarakat tidak politis dan bertujuan untuk melegitimasi kekuasaan, melainkan muncul dari kebiasaan perilaku sosial masyarakat dalam berkomunikasi.

Sejak saat itu kami jadi lebih akrab. Paling tidak itulah yang saya rasakan. Kami tak lagi ber-saya dan Anda ketika berbincang. Kami sudah ber-aku dan kau. (Susanto, 2015, h. 48).

Narasi tokoh Aku di atas menunjukkan bahwa ia merasa telah akrab dengan Mei Hwa sejak perkenalannya beberapa hari sebelumnya. Keakraban tersebut diungkapkan melalui cara penggunaan bahasa keduanya dalam berkomunikasi. Tokoh Aku menyatakan bahwa sejak intens bertemu, ia dan Mei Hwa akhirnya tidak lagi berbicara dengan panggilan-panggilan formal, seperti *saya* dan *Anda*. Namun, mereka sudah menggunakan panggilan *aku* dan *kau*. Hal ini menandakan bahwa pemikiran tokoh Aku terkontrol oleh aturan-aturan dalam bahasa. Kontrol tersebut membuatnya merasa jika bahasa yang digunakan dapat merepresentasikan perasaan, kedekatan, dan keakraban antarpemakainya.

Relasi Kuasa atas Tubuh dalam Cerpen "Mei Hwa"

Bentuk-bentuk relasi kuasa atas tubuh yang ditemukan dalam cerpen "Mei Hwa" terbagi menjadi dua. Pertama, relasi kuasa yang terjadi pada tubuh sosial, meliputi objektifikasi terhadap tubuh, manipulasi terhadap tubuh, kontrol terhadap tubuh, dan stigmatisasi terhadap tubuh. Kedua, relasi kuasa yang terjadi pada tubuh seksual berupa stigmatisasi terhadap tubuh individu.

Tubuh Sosial

Bentuk relasi kuasa atas tubuh sosial yang pertama berupa objektifikasi tubuh yang terjadi melalui wacana bahasa dan gender. Dalam konteks cerpen, pemberian julukan secara tidak sadar memberi tekanan pada tubuh untuk melakukan aktivitas yang mengarah pada julukan tersebut.

Sejak saat itu, para orang tua melarang kami bermain di bengawan. Saya kecewa, saya marah, tetapi tak bisa melawan. Jauh di dasar hati tumbuh kebencian pada bengawan itu. Kenapa ia tetap berada di sana, sementara kegembiraan kami, kegembiraan saya telah terenggut. Bengawan itulah yang telah merenggut kegembiraan kami. Saya makin membenci bengawan itu lantaran terasa benar betapa julukan sebagai Putri Bengawan telah berubah menjadi ejekan. (Susanto, 2015, h. 51).

Narasi di atas merupakan cerita tokoh Aku tentang masa kecilnya. Ia dijuluki sebagai Putri Bengawan karena kesenangannya untuk berlama-lama berenang di bengawan melebihi anak laki-laki. Namun, perlahan julukan itu dirasanya sebagai ejekan ketika para orang tua melarang dan mengontrol anak-anaknya untuk berenang di bengawan tersebut. Artinya, tokoh Aku yang telah terobjektifikasi untuk perilaku-perilaku kesehariannya merasa bahwa pengobjektifasian tersebut sebagai sebuah ejekan lantaran tubuhnya kehilangan ruang untuk melakukan rutinitas di bengawan.

Selain itu, tampak juga relasi kuasa berupa objektifikasi gender yang terjadi pada tokoh Aku. Karena anak laki-laki tidak ada yang memiliki kebiasaan untuk berlama-lama berenang di bengawan, akhirnya para anak laki-laki memberi julukan pada tokoh Aku. Hal tersebut menandakan adanya relasi kuasa yang dilakukan para anak laki-laki untuk mengobjektifikasi tubuh perempuan. Pemberian julukan "Putri Bengawan" dapat mengandung makna konotatif, seperti seharusnya perempuan tidak memiliki hobi layaknya anak laki-laki atau semestinya perempuan bisa bersikap lebih feminim dalam bergaul.

Selanjutnya, praktik relasi kuasa atas tubuh sosial ditemukan dalam bentuk manipulasi dan kontrol tubuh oleh sistem kapitalisme. Produksi kapitalisme yang masif menciptakan pola kehidupan konsumerisme di masyarakat. Hal ini tampak pada dua peristiwa dalam cerpen "Mei Hwa" karya Gunawan Budi Susanto.

"Mei, baju pengganti sudah kusiapkan di luar ya," ujar saya rada keras di depan pintu kamar mandi. Tanpa menunggu jawaban, saya kembali ke almari. Mencopot celana dan baju, berganti celana pendek dan kaus oblong. Saya keluar kamar mandi meraup dan membawa pakaian kotor ke mesin cuci di ruang belakang. (Susanto, 2015, h. 54).

Dari kutipan di atas terlihat bagaimana tokoh Aku digambarkan sebagai salah satu masyarakat yang termanipulasi untuk menggunakan produk industri berupa mesin cuci. Teknologi tersebut berhasil menggeser cara konvensional menjadi lebih praktis dan efisien. Setidaknya dua aspek tersebut adalah beberapa alasan dari diciptakannya produk-produk

industri untuk sektor rumah tangga. Tubuh masyarakat terkontrol untuk memaksimalkan fungsi dari produk-produk kapitalisme dan secara tidak sadar kebutuhan terhadap segala jenis teknologi praktis adalah bentuk relasi kuasa yang memanipulasi tubuh masyarakat melalui wacana kapitalisme.

Produk industri selanjutnya yang terdapat pada cerpen adalah rokok yang dihasilkan perusahaan. Hal tersebut tampak pada kutipan berikut.

Kini, saya telah duduk nyaman di dapur hangat yang menyatu dengan ruang tamu. Saya meraih secangkir kopi dan menata secangkir lain tepat di seberang. Ah, lupa! Saya mengeluarkan sebungkus rokok dari lemari dinding. Kembali duduk, menyulut sebatang, lalu menyeruput kopi hitam dan kental dengan sedikit gula. Namun sampai batang rokok itu habis, Mei Hwa tak keluar-keluar dari kamar. Kenapa? (Susanto, 2015, hh. 54—55).

Narasi di atas mendeskripsikan aktivitas yang dilakukan tokoh Aku di dapur ketika ia menunggu Mei Hwa membersihkan badannya. Di dapur, tokoh Aku menikmati kopi dan rokok (bungkusan) yang diambilnya dari lemari dinding. Rokok bungkusan merupakan produk industri kapitalisme. Rokok ini berbeda dari lintingan yang dikenal sebagai produk budaya. Artinya, ada manipulasi yang dilakukan melalui wacana kapitalisme sehingga mampu mengontrol tubuh masyarakat untuk menggunakannya. Manipulasi tersebut berupa kepraktisan dan citarasa tertentu yang ditawarkan tiap perusahaan rokok. Hal inilah lantas menjadikan produk rokok bungkusan banyak digemari dan diminati masyarakat modern.

Selanjutnya adalah praktik relasi kuasa berupa stigmatisasi tubuh sosial. Dalam konteks cerpen, stigmatisasi dan objektifikasi tubuh sosial merepresentasikan peristiwa pemerkosaan massal yang mayoritas menimpa perempuan Tionghoa pada Mei 1998.

Begitulah, Lel. Seharian-hari aku cuma membaca dan membaca. Sesekali saja nonton televisi, mengikuti berita soal perkembangan keadaan di luar sana. Hari itu, hari terkutuk itu, aku sedang merampungkan sebuah novel. Tiba-tiba terdengar teriakan-teriakan. Lalu, tiba-tiba, pintu apartemenku jebol, runtuh ke lantai, berdebum keras. Aku sangat terkejut. Belum sempat aku menyadari keadaan, beberapa lelaki seperti hantu begitu saja sudah berada di ruangan apartemenku. Mereka mengepungku dari segenap penjuru, dan.... (Susanto, 2015, h. 59).

Narasi di atas adalah cerita Mei Hwa tentang pengalaman kelamnya ketika masih tinggal di sebuah apartemen di Jakarta yang mayoritas penghuninya merupakan etnis Tionghoa. Ketika itu, perusahaannya terpaksa meliburkan seluruh karyawan karena kerusakan yang makin meluas dan mengerikan. Mei Hwa lalu menghabiskan hari di dalam apartemennya. Tiba-tiba ia dikejutkan oleh kedatangan sekelompok lelaki yang mendobrak pintu kamarnya dan dengan keji memerkosanya secara bergiliran.

Aku tersadar dengan tubuh remuk, Lel. Ruangan apartemenku berantakan. Segala apa terjungkir balik. Tak ada barang berharga tersisa. Dan, Lel! Aku pingsan begitu menyadari tubuhku telanjang bulat dan dari pangkal paha mengalir darah. Darah membasahi lantai. (Susanto, 2015, h. 59).

Dari peristiwa di atas, tampak bahwa pascakrisis moneter di masa Orde Baru, masyarakat Tionghoa khususnya para perempuan dijadikan korban objektifikasi seksual oleh oknum-

oknum yang hingga hari ini tidak diketahui dalangnya. Pertanyaan yang kemudian hadir adalah motif seperti apa yang mendasari pemerkosaan massal terhadap perempuan khususnya etnis Tionghoa di masa gencar-gencarnya masyarakat ingin menggulingkan kekuasaan Orde Baru. Pemerkosaan massal yang sistemik tersebut merupakan bentuk stigmatisasi politis yang terjadi pada tubuh sosial dan terepresentasikan melalui sikap para oknum pemerkosa.

Praktik relasi kuasa atas tubuh sosial yang terakhir dalam teks cerpen "Mei Hwa" karya Gunawan Budi Susanto adalah objektifikasi tubuh sosial seperti pada dua kutipan berikut.

Senyum yang manis, teramat manis. Mata sipitnya makin sipit. Ingatan saya melejing pada sosok Ang San Mei. Penjelmaan kekasih Minke-kah dia? Apalagi dalam bayangan saya, tubuhnya pun sekurus dan serapuh gadis dari Tiongkok nun pada awal abad XX itu. (Susanto, 2015, h. 46).

"Kenapa? Itu yang ingin kau ketahui? Cuma itu?" ujar dia nyaris seperti merepet. Nada bicara yang cepat itu membuat saya jadi lebih memperhatikan bibirnya. Bibir tanpa pemerah. Bibir tipis yang manis dengan lekukan sempurna. (Susanto, 2015, h. 46).

Pada kutipan pertama, tampak usaha pengobjektifasian pada tubuh Mei Hwa berupa mata sipit dan tubuh yang kurus. Tokoh Aku kemudian membandingkan tubuh Mei Hwa sebagai representasi dari sosok Ang San Mei, tokoh fiktif wanita Cina yang juga seorang aktivis pergerakan Revolusi Cina yang melarikan diri ke Hindia Belanda dalam roman *Jejak Langkah* karya Pramoedya Ananta Toer.

Lalu pada kutipan kedua, tampak kekaguman tokoh Aku terhadap visual fisik Mei Hwa. Pada kalimat "Bibir tipis yang manis dengan lekukan sempurna," terdapat pemaknaan yang merujuk pada praktik relasi kuasa atas tubuh sosial berupa standarisasi kecantikan untuk menilai ideal tidaknya fisik perempuan.

Konteks peristiwa di dua kutipan tersebut menandakan adanya standarisasi kecantikan perempuan yang berlaku di tubuh masyarakat. Hal ini kemudian menyebabkan masyarakat memiliki standar-standar tertentu untuk mengidentikkan atau mengidentifikasi fisik perempuan, seperti bentuk wajah, bentuk bibir, mata, hidung, telinga, hingga ukuran tubuh. Pengobjektifasian semacam ini merupakan relasi kuasa yang terjadi pada tubuh masyarakat.

Salah satu wacana yang dapat menciptakan kriteria kecantikan adalah media massa. Media massa memiliki peran yang cukup penting dalam terciptanya suatu pandangan terhadap kecantikan dalam masyarakat. Media massa sering menampilkan bentuk dan ukuran tubuh yang ideal baik pada pria maupun pada wanita. Dengan demikian akan terbentuk suatu norma sosial tentang standar dan ukuran tubuh yang ideal dalam masyarakat (Grogan, 1999 dalam Prahmadhani, 2007, h. 18).

Tubuh Seksual

Dalam cerpen "Mei Hwa" karya Gunawan Budi Susanto, ditemukan juga praktik relasi kuasa yang terjadi pada tubuh seksual. Relasi kuasa tersebut berupa stigmatisasi tubuh seksual yang berdampak pada politik ingatan korban kekerasan seksual.

... Kata kawan saya, Mei Hwa mau bertemu tetapi tidak mau diliput. Saya iyaikan saja syarat itu. Saya toh bisa menulis orang lain. Namun paling tidak hasil pengamatan saya terhadap kegiatan dia bisa memberikan perspektif lebih jelas tentang pendidikan bagi anak-anak miskin. Jadi, walaupun dia tak mau diekspose, tak masalah. (Susanto, 2015, h. 47).

Narasi di atas adalah ungkapan tokoh Aku tentang sosok Mei Hwa yang baru dijumpainya. Ketika tokoh Aku hendak meliput tentang situasi pendidikan bagi anak-anak miskin di Semarang yang kebetulan Mei Hwa adalah salah satu guru pembimbing di sana, Mei Hwa menolak secara tegas untuk dirinya masuk dalam liputan. Hal ini karena trauma masa lalu yang masih dirasakan Mei Hwa. Ia tidak ingin identitasnya terungkap dan diketahui publik. Ketakutan semacam ini adalah efek dari politik ingatan yang terjadi pascapemeriksaan massal sistemik pada Mei 1998.

Kondisi korban sangat berbeda-beda, tetapi benang merah yang menautkan mereka semua ialah ketidak-inginan identitasnya dibuka. Dan bagi sebagian dari mereka, kontak dengan pihak di luar lingkaran ketat mereka membawa risiko terbukanya identitas mereka. Apalagi mereka yang diperkosa atau dianiaya di rumah atau di tempat usahanya sendiri, dan diancam akan "didatangi" lagi apabila membuka mulut (Anggraeni, 2014, h. 123).

Bahkan efek trauma korban kekerasan seksual juga ditampakkan dengan jelas dalam teks cerpen seperti pada kutipan berikut.

Setiap orang yang menjenguk ke kamar perawatan bersikap baik padaku. Namun aku ketakutan setiap kali ada lelaki, entah siapa, mungkin dokter, memasuki kamar perawatanku. Setiap kali berteriak ketakutan, sesaat kemudian aku tak tahu lagi apa yang terjadi. Mungkin hilang kesadaran. (Susanto, 2015, h. 60).

Dari narasi di atas, tergambar jelas bagaimana psikologi Mei Hwa pascapemeriksaan massal yang menimpa dirinya. Rasa trauma betul-betul dirasakannya terhadap semua laki-laki yang berada di dekatnya ketika masih dirawat di rumah sakit. Hal ini karena ketakutan dan kewaspadaan dalam diri korban. Bagi yang diperkosa dan dianiaya di tempat umum, mereka tidak bebas dari ketakutan bahwa kejahatan itu akan diulangi atas dirinya (Anggraeni, 2014, h. 123). Dalam hal ini, politik ingatan yang terjadi pascaperistiwa pemeriksaan sistemik telah membekas di ingatan para korban Mei 1998.

Orde Baru Prareformasi Mei 1998

Pada masa Orde Baru, negara mengalami krisis ekonomi yang sangat memengaruhi kehidupan masyarakat akibat dampak dari krisis moneter di Asia sejak awal Juli 1997. Anggraeni (2014, h. 20) menyatakan dalam waktu kurang dari enam bulan krisis sudah menggerogoti seluruh kawasan, rupiah yang merosot terus sudah sampai Rp11.000,00 per dollar AS (dari Rp2.447,00 per dollar AS sebelum krisis) menyebabkan kepanikan di masyarakat.

Menurut laporan, terjadi pemborongan dan penumpukan barang oleh pihak-pihak yang memiliki modal lebih. Rakyat yang tidak gesit menjadi lebih tidak mampu lagi, karena semua barang, termasuk sembilan bahan pokok, nyaris hilang dari pasar. Kalaupun ada, dalam pasar gelap dengan harga tak terjangkau (Anggraeni, 2014, h. 20). Hal ini lantas memicu massa mulai bergerak untuk menuntut perubahan. Di beberapa titik kota besar, mahasiswa, akademisi, dan kelompok masyarakat yang peduli pada situasi politik-ekonomi nasional mulai menyatakan ketidakbecusan pemerintah terhadap keadaan negara dan menyuarkan tuntutan agar Soeharto turun dari jabatannya.

Massa yang mulai menyuarkan tuntutan lalu mendapat sambutan represif dari aparat keamanan. Sampai 12 Mei 1998, kabar tentang empat mahasiswa Trisakti yang mati ditembak aparat menjadi momentum terciptanya gelombang utama yang memecah amarah massa. Di masa rentan inilah, terdapat banyak spekulasi tentang kehadiran oknum-oknum yang

berupaya memanfaatkan keadaan genting di tingkat nasional untuk kepentingan politik masing-masing. Kondisi sosial sudah seperti merang yang sudah kering-garing, siap untuk dibakar (Anggraeni, 2014, hh. 21—22). Hal itu yang, sekali lagi, menyebabkan serentetan peristiwa memilukan dan memalukan dalam sejarah bangsa Indonesia pascakemerdekaan. Salah satu spekulasi yang perlu untuk diperhitungkan adalah hasil pengamatan Sri Palupi, koordinator investigasi dan pendataan Tim Relawan untuk Kemanusiaan yang menyatakan bahwa kerusuhan Mei 1998 sudah dirancang dan direkayasa jauh sebelum peristiwa terjadi.

Mereka, termasuk para jenderal yang tidak ada hubungannya dengan urusan ekonomi, berbicara dalam ranah publik seolah-olah mereka memahami betul masalah ekonomi. Mereka, dalam berbagai pengutaraan, mengatakan bahwa krisis ekonomi melanda Indonesia karena orang-orang Tionghoa melarikan uang rakyat ke luar negeri, dan orang-orang Tionghoa yang masih berada di tanah air, menimbun barang-barang sembako sehingga rakyat sengsara dan kelaparan (Anggraeni, 2014, h. 68).

Artinya, memang ada kesengajaan yang dilakukan oknum-oknum pemerintahan dalam menggiring opini masyarakat agar mengkambinghitamkan kehadiran orang Tionghoa sebagai salah satu penyebab krisis yang melanda Indonesia, dan juga sebagai objek utama yang patut untuk disalahkan. Meski pada akhirnya, 22 Mei 1998 Soeharto mengumumkan dirinya mundur dari jabatan presiden yang dikuasainya selama 32 tahun, tetapi aksi kerusuhan dan kebiadaban yang menysar pada salah satu etnis di Indonesia selama proses menuju reformasi tidak bisa dilupakan begitu saja.

Selain menjadi noda hitam dalam perjuangan untuk meruntuhkan kediktatoran Orde Baru, juga sekaligus pil pahit yang menggambarkan betapa mudahnya Indonesia sebagai bangsa merdeka dipecah-belah oleh permainan politik identitas yang diwariskan kolonial ratusan tahun lalu. Palupi yakin bahwa semua itu sudah direkayasa oleh pihak yang merencanakan kerusuhan ini, bukan peristiwa yang terjadi spontan, seperti yang banyak disebut-sebut oleh penguasa maupun beberapa kelompok dalam masyarakat. Dan sampai sejauh ini, para pentolan rekayasa ini lolos dari jangkauan hukum (Anggraeni, 2014, h. 75).

Setidaknya ditemukan dua citra Orde Baru Prareformasi Mei 1998 yang terdapat dalam cerpen "Mei Hwa" karya Gunawan Budi Susanto. Citra-citra Orde Baru tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut: (1) sentimen anti-Tionghoa dan penjarahan dan (2) pemerkosaan massal yang sistemik.

Sentimen Anti-Tionghoa dan Penjarahan

Sebelumnya, perlu dipahami latar belakang seperti apa yang menyebabkan hadirnya sentimen, rasialisme, dan stereotipe yang diarahkan pada masyarakat Tionghoa (dulu disebut Cina). Jika dirunut secara historis, maka ada tiga periode awal sebelum masuk pada kehidupan Tionghoa masa Orde Baru, yakni periode VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*), pemerintahan Hindia Belanda, dan pemerintahan Orde Lama.

Pada zaman VOC sentimen dan diskriminasi mulai dimunculkan akibat pesatnya perkembangan jumlah etnis Tionghoa di Batavia. VOC lalu merasa takut karena tercipta persaingan bisnis di Batavia. Ketakutan ini mencapai puncaknya dalam peristiwa pembantaian pertama terhadap orang Tionghoa di Batavia pada Oktober 1740. Imbasnya adalah pemerintah kolonial mengeluarkan sejumlah kebijakan yang membatasi ruang gerak orang-orang Tionghoa di Hindia Belanda, seperti aturan 'pecinan' yang sangat diskriminatif, larangan orang

Tionghoa memiliki tanah, dan lainnya, sampai pada politik pecah-belah berdasar ras yang turut menyumbangkan pandangan rasialisme di kalangan pribumi.

Pemerintah kolonial tidak menginginkan etnis-etnis nonpribumi yang ada di negeri jajahannya, termasuk etnis Tionghoa berbaur dengan pribumi. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah segala kemungkinan yang dapat menimbulkan pemberontakan (Nurchayyo, 2016: 3). Akibatnya, kesenjangan yang dibuat kolonial jadi pemicu dikotomi dan kesenjangan antara pribumi dan nonpribumi pascakemerdekaan. Sekalipun sejak masa pemerintahan Hindia Belanda, orang-orang Cina sebagai mitra dagang, tetapi politik 'pecah-belah' terhadap golongan antaretnis tetap diterapkan. Sikap kebangsaan etnis Tionghoa saat itu semakin 'dikebiri' oleh pemerintah. Etnis Tionghoa sangat dibatasi untuk menunjukkan sikap mereka dalam memaknai kewarganegaraannya di Indonesia. Kebudayaan serta kebiasaan yang mereka miliki 'terpangkas' dengan adanya aturan-aturan dan pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah (Permana, 2018, h. 4).

Pada masa Orde Lama, pemerintah membolehkan etnis Tionghoa mengapresiasi kebudayaan mereka dan menjalankan agama atau keyakinan mereka. Namun, pemisahan tetap terjadi karena dalam kenyataannya tidak ada interaksi yang efektif antara etnis Tionghoa dengan etnis lainnya. Akibatnya banyak konflik horizontal terjadi akibat kesenjangan kemakmuran etnis Tionghoa dengan pribumi (Permana, 2018, h. 4). Selama tahun 1959—1960 kampanye pengusiran berlangsung dengan dukungan pihak TNI AD sebanyak 136.000 orang Tionghoa meninggalkan Indonesia, sementara 1.000.000 orang di antaranya pulang ke tanah leluhur Cina (Mackie, 1976, hh. 82—85 dalam Permana, 2018, h. 5).

Dari penjabaran singkat di atas, dapat dipahami bahwa sampai hari ini stigma-stigma negatif telah dilekatkan pada orang-orang Tionghoa di Indonesia, mulai dari Tionghoa sebagai antek Belanda, antipati pada pergerakan kemerdekaan, hingga diperparah oleh kesenjangan perekenomian antara etnis pribumi dan nonpribumi. Sementara, gambaran umum mengenai etnis Tionghoa di Indonesia yang ada selama ini adalah stigma bahwa golongan Tionghoa merupakan 'binatang ekonomi' (*economic animal*) yang bersifat oportunis, tidak memiliki loyalitas politik, dan hanya memikirkan kepentingan diri sendiri (Kwartanada, 1996 dalam Darini, 2011: 2). Pencitraan identitas pada suatu individu atau kelompok semacam itulah yang kemudian membuat masyarakat Tionghoa begitu gampang dijadikan bahan diskriminasi di kehidupan sosial.

Diskriminasi terhadap orang Tionghoa dalam cerpen "Mei Hwa".

Perlakuan diskriminatif selama masa kekuasaan Orde Baru tidak hanya disebabkan warisan sentimen yang diciptakan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Ketika Orde Baru berkuasa, sikap diskriminatif dalam lingkup sosial masyarakat terlegitimasi oleh aturan-aturan khusus yang dikeluarkan rezim kepada etnis Tionghoa di Indonesia. Artinya, pemerintah Orde Baru sengaja merawat dan menanamkan watak diskriminatif masyarakat terhadap etnis Tionghoa di Indonesia.

Beberapa peraturan yang mengatur eksistensi etnis Tionghoa, antara lain Instruksi Presiden No. 14/1976 tentang larangan kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat Tionghoa di Indonesia; Surat Edaran No. 06/Preskab/6/1967 tentang keharusan masyarakat Tionghoa untuk mengubah namanya yang identik dengan nama-nama Indonesia; SK Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 286/1978 tentang pelarangan impor dan penggunaan bahasa Cina; Surat Edaran SE. 02/SE/Ditjen/PPG/K/1978 tentang larangan menerbitkan dan mencetak untuk iklan yang beraksara Cina di depan umum; Peraturan Menteri Perumahan No. 455.2-360/1988 tentang larangan penggunaan lahan untuk mendirikan atau memperbaiki klenteng;

dan Keputusan Presiden No. 56/1996 tertanggal 9 Juli 1996 yang mengharuskan penghapusan SBKRI (Permana, 2018, h. 7).

Masing-masing aturan itulah yang pada akhirnya membuat orang-orang Tionghoa kian tersingkirkan dari kehidupan sosial di masyarakat. Sebagai warga negara, status tersebut telah dicabut dari orang-orang Tionghoa. Mereka kehilangan hak yang sama sebagai masyarakat sosial, baik di mata hukum maupun di mata kemanusiaan. Hal demikian direpresentasikan oleh Mei Hwa dalam teks cerpen.

Aku tinggal di apartemen, tak jauh dari kantor perusahaan tempatku bekerja. Bukan apartemen mewah. Namun justru itulah yang kelak kusesali. Lantaran tingkat pengamanan dan keamanan yang tak ketat, apalagi mayoritas penghuni sesama mata sipit, bencana jadi begitu mudah menghampiri kami... (Susanto, 2015, h. 58).

Jika pernyataan di atas diperhatikan secara cermat, Mei Hwa memberikan sebuah fakta bahwa di apartemen tempat tinggalnya yang mayoritas merupakan keturunan Tionghoa (ia gambarkan dengan 'mata sipit'), bencana jadi begitu mudah menghampiri. Bencana yang dimaksudkan bukanlah peristiwa alamiah, melainkan pergesekan-pergesekan antarmasyarakat yang berpangkal pada politik identitas di masa Orde Baru. Seolah ia menyatakan bahwa di mana pun orang Tionghoa berada, mereka merupakan target buruan yang sah untuk diperlakukan apa saja dan hukum menjamin hal tersebut.

Meski demikian, memang tak semua orang Tionghoa mengalami nasib buruk di tangan penguasa. Suryadinata (2002, h. 119) menyatakan bahwa ada orang-orang Tionghoa kaya yang baru muncul sesudah bangkitnya Orde Baru, menjalin kerja sama dengan elite penguasa pribumi. Artinya, beberapa orang Tionghoa tersebut, terutama para konglomerat dan elite ekonomi Tionghoa justru dijadikan alat untuk mencapai stabilisasi ekonomi pasca Orde Baru berkuasa. Beberapa nama besar tersebut, misalnya Sudono Salim (Liem Sioe Liong), Mochtar Riady (Li Wenzheng), Ciputra (Tjie Tjin Hwan), William Soeryadjaya (Tjia Kian Liong), Eka Tjipta (Oei Ek Tjhong), Hendra Rahardja (Tan Tjoe Hin), Surya Wonowidjojo (Tjoan Ing Hwie), Usman Admadjaja (Njauw Jouw Woe), dan Prayogo Pangestu (Phang Djun Phen).

Mengacu pada fakta di atas, artinya tidak semua masyarakat Tionghoa memiliki nasib kaya raya dan hidup dalam kemewahan. Begitu sebaliknya, mereka yang hidup dalam kemewahan bukanlah representasi keseluruhan orang Tionghoa di Indonesia. Bagi kalangan pemilik modal, mereka akan merapat ke kekuasaan dan memperoleh keuntungan ekonomi. Proteksi politik ini membuat pengusaha Tionghoa memonopoli sektor ekonomi sampai akhirnya dapat membangun imperium bisnis di Indonesia. Dari sinilah muncul cukong, taipan, dan konglomerat. Mereka bekerja sama dengan petinggi-petinggi militer yang pada saat itu menjadi aktor politik yang sangat berpengaruh (Permana, 2018, h. 34).

Namun, karena sentimen anti-Tionghoa yang telah tertanam di benak masyarakat, semua nasib orang Tionghoa dipukul rata ketika terjadi suatu konflik yang diakibatkan faktor kesenjangan ekonomi. Latar belakang sejarah di bidang ekonomi warga Tionghoa telah melahirkan kekuatan mitos ekonomi masyarakat Tionghoa. Terdapat pemukulrataan bahwa etnis Tionghoa adalah kaya dan memperoleh akses pada kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan nasional seperti dahulu masyarakat Tionghoa mendapatkan perlindungan dan keistimewaan dari pemerintah kolonial yang ditandai dengan memberikan izin perdagangan kepada etnis Tionghoa (Darini, 2011, h. 9).

Hal-hal inilah yang selalu menjadi sebab dari tindakan diskriminasi di kehidupan bersosial. Meski tak dapat dinafikan bahwa kentalnya pandangan anti-Tionghoa, dihasilkan atau

direkayasa melalui kebijakan negara sebagai alat peredam yang dipakai penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya (Permana, 2018, h. 8).

Menjadi target kerusuhan dalam cerpen "Mei Hwa".

Di masa Orde Baru, konflik horizontal dengan menggunakan politik identitas telah terjadi sejak masa perebutan kekuasaan pada 1966-an. Etnis Tionghoa terkena imbas dari situasi politik-ekonomi pada saat itu, yakni inflasi yang melonjak tinggi, kelangkaan barang-barang kebutuhan pokok, dan frustrasi terhadap kebijakan ekonomi pemerintahan Sukarno. Rasa frustrasi dengan mudah diarahkan dengan mencari target kemarahan yang termanifestasikan dalam kerusuhan anti-Tionghoa, dan ini adalah bagian dari pertarungan yang memperebutkan kekuasaan politik antara kekuatan kiri dengan kekuatan kanan (Darini, 2011, h. 5 dalam Permana, 2018, h. 6).

Pasca Orde Baru berkuasa, kerusuhan yang sama berulang kali menimpa etnis Tionghoa. Salah satunya pada sederet peristiwa ketika krisis moneter melanda Asia sejak awal Juli 1997. Pada subbab sebelumnya telah dibahas pola kebijakan ekonomi Orde Baru khusus terhadap orang Tionghoa. Orang Tionghoa mendominasi sektor ekonomi yang luar biasa besar dan di satu sisi menjadikannya kelompok yang apolitis dan jauh diri dari kehidupan sosial politik. Maka tidak heran bila dalam waktu yang bersamaan, selalu menempatkan orang-orang Tionghoa menjadi kambing hitam dari persoalan politik (Permana, 2018, h. 34).

Paling nyata adalah pada peristiwa Mei 1998, ketika masyarakat sadar pada ketidakmampuan negara dalam memperbaiki sistem ekonomi yang mengakibatkan massa menjadi krisis kepercayaan dan situasi sosial kian memanas. Anggraeni (2014, h. 22) menyatakan keputusan, kemarahan, dan kebencian yang terarahkan adalah senjata ampuh bagi yang tahu "mengarahkannya". Dampaknya adalah masyarakat menjadi gampang tersulut oleh propaganda oknum-oknum yang kian menggarisbawahi kesenjangan ekonomi antara pribumi dan etnis Tionghoa yang semuanya dianggap memiliki modal cukup untuk bertahan di masa krisis 1998.

Kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah Orde Baru telah memberikan kesempatan etnis Tionghoa untuk berwirausaha secara bebas, memicu ketidakpuasan di kalangan masyarakat pribumi karena pencapaian ekonomi oleh etnis Tionghoa mengakibatkan kesenjangan sosial antara etnis Tionghoa dan pribumi. Kondisi inilah yang memicu kerusuhan dengan bentuk pengrusakan di tahun 1998 di Jakarta (Permana, 2018, h. 8). Akhirnya, untuk kesekian kali etnis Tionghoa menjadi sasaran amukan massa. Representasi peristiwa ini terdapat dalam teks cerpen "Mei Hwa".

Kadaan makin genting. Di beberapa titik kota terjadi kerusuhan, pembakaran, penjarahan... (Susanto, 2015, h. 59).

Penggambaran Mei Hwa dalam teks cerpen tentang peristiwa kerusuhan yang disaksikannya dari jendela apartemen tempat tinggalnya, setidaknya senada dengan peristiwa yang terjadi sejak 13 Mei 1998 di Jakarta tentang sejumlah kawasan bisnis dan pemukiman warga etnis Tionghoa yang dijadikan sasaran kerusuhan hebat. Pembakaran, penjarahan, penganiayaan terjadi tanpa ada aparat keamanan yang datang menolong, meskipun warga mengatakan berkali-kali menelepon dan memanggil mereka. Bahkan aparat yang kelihatan di dekat tempat-tempat itu, menurut kisah warga, hanya mengawasi dan tidak berbuat apa-apa

untuk menghalangi apalagi menghentikan aksi-aksi kejahatan di dekat dan di sekitarnya (Anggraeni, 2014, h. 22).

Selain itu, dalam teks cerpen juga diungkapkan Mei Hwa bahwa ketika kerusuhan menimpa dirinya, seluruh barang-barang dalam kamar apartemen miliknya habis diambil oknum penjarahan. Seolah semua harta yang dimiliki kaum Tionghoa berhak untuk diambil sesukanya selama kerusuhan terjadi.

Aku tersadar dengan tubuh remuk, Lel. Ruangan apartemenku berantakan. Segala apa terjungkir balik. Tak ada barang tersisa... (Susanto, 2015, h. 59).

Memang tidak ada referensi utama yang dapat digunakan sebagai rujukan untuk mengetahui siapa oknum tersebut dan adakah motif lainnya selain ketimpangan ekonomi yang telah dibahas pada subbab sebelum ini. Namun, beberapa fakta memang menyatakan bahwa pemicu utamanya adalah penggunaan kembali sentimen anti-Tionghoa. Seperti yang diungkapkan Anggraeni (2014, h. 23) bahwa sebelum dibakar, sejumlah individu tak dikenal meneriakkan yel-yel yang mengobar-ngobarkan kebencian terhadap etnis Tionghoa, dan kerumunan rakyat yang 'kena' hasutan ini disemangati untuk masuk ke dalam untuk menjarah. Sejauh ini, dapat disimpulkan bahwa kerusuhan yang menimpa etnis Tionghoa terjadi karena ada oknum yang sengaja menggunakan sentimen lama untuk memprovokasi massa yang tak terkendali akibat dampak dari krisis moneter dan di lain sisi, akibat hilangnya peran dan upaya negara dalam mengatasi hal tersebut.

Pemeriksaan Massal yang Sistemik

Di antara banyaknya peristiwa tak berperikemanusiaan selama aksi kerusuhan 13—15 Mei 1998, salah satu aksi paling memalukan adalah ditemukannya fakta pelecehan seksual hingga pemerkosaan selama peristiwa berlangsung. Data pelecehan seksual yang ditemukan, ada yang terjadi pada perempuan-perempuan yang memakai jilbab (Anggraeni, 2014: 29), ada pula pengaduan dari korban laki-laki (Anggraeni, 2014, h. 74), dan kenyataan paling menyayat dan menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan adalah pemerkosaan massal yang mayoritas menimpa perempuan Tionghoa.

Tragedi kemanusiaan yang, di satu sisi, dapat dikatakan sebagai pemicu lahirnya Komnas Perempuan pada 22 Juli 1998 yang hingga kini aktif membela hak-hak kaum perempuan. Namun, patutkah hal itu dirayakan sebagai suatu kemenangan atas hadirnya ruang pembebasan sementara tabir gelap di baliknya malah senantiasa ditutupi oleh negara? Dibandingkan dengan peristiwa-peristiwa kelam yang pernah terjadi di Indonesia, kasus pemerkosaan massal pada kurun Mei 1998 memang tak banyak dibahas sebagai suatu kajian diskursif, baik di kalangan para sejarawan maupun para akademisi. Padahal telah banyak data penyintas berupa pengaduan langsung kepada para relawan kemanusiaan maupun melalui pihak ketiga yang dipercayai, atau bahkan dari laporan TGPF.

Pemeriksaan massal yang menimpa kaum perempuan, terutama etnis Tionghoa adalah tragedi dalam perjalanan bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Anggraeni (2014, h. 69) menyebutkan bahwa sesudah kerusuhan Mei 1998 Tim Relawan untuk Kemanusiaan mengeluarkan tiga dokumen. Yang pertama tentang pola kerusuhan, yang kedua tentang status para penjarah, dan yang ketiga tentang pemerkosaan. Khusus untuk kasus pemerkosaan, sebagian besarnya berupa *gang rapes* atau pemerkosaan yang dilakukan beramai-ramai. Peristiwa pemerkosaan terhadap perempuan Tionghoa, salah satunya dialami oleh Mei Hwa pada peristiwa Mei 1998 di Jakarta dalam teks cerpen "Mei Hwa".

Hari itu, hari terkutuk itu, aku sedang merampungkan sebuah novel. Tiba-tiba terdengar teriakan-teriakan. Lalu, tiba-tiba, pintu apartemenku jebol, runtuh ke lantai, berdebum keras. Aku sangat terkejut. Belum sempat aku menyadari keadaan, beberapa lelaki seperti hantu begitu saja sudah berada di ruangan apartemenku. Mereka mengepungku dari segenap penjuru, dan... (Susanto, 2015, h. 59).

Dalam kutipan di atas, tampak betul bagaimana peristiwa mengerikan tersebut digambarkan oleh Mei Hwa sesaat sebelum ia tak sadarkan diri akibat pemerkosaan tersebut. Para pelaku pemerkosaan yang telah kalap dan bertindak di luar kemanusiaan itu, dengan serampangan menjebol pintu-pintu tempat tinggal orang Tionghoa lalu dengan buasnya melakukan pemerkosaan massal. Peristiwa ini persis dengan fakta yang diungkap TGPF berikut:

Dari pemetaan peristiwa yang sudah diverifikasi, TGPF menyebutkan bahwa kekerasan seksual dalam kerusuhan Mei 1998 terjadi di dalam rumah, di jalan, dan di tempat usaha. Kebanyakan dari kejahatan ini terjadi di dalam rumah atau di dalam bangunan. Sebagian besar kasus adalah *gang rapes*, atau pemerkosaan yang dilakukan beramai-ramai, di mana korban diperkosa oleh sejumlah orang secara bergantian di tempat yang sama. Dan kebanyakan aksi ini dilakukan di hadapan orang lain (Anggraeni, 2014, h. 148).

Meskipun dalam laporan TGPF tidak secara detail mengungkap aktor-aktor di balik kerusuhan yang mengatasnamakan SARA pada peristiwa Mei 1998, tetapi hal penting yang mesti diketahui publik adalah kebenaran peristiwa pemerkosaan massal tersebut, berikut dengan segala laporan dari korban dan saksinya. Karena dari fakta-fakta lain yang ditemukan, pasca Mei 1998, pemerkosaan masih juga terjadi di beberapa kota. Korbannya masih perempuan etnis Tionghoa, yang didatangi rumahnya, maupun yang dicegat di jalan di kawasan pemukimannya atau di tempat-tempat umum lainnya. Kemungkinan besar karena para pelaku keji ini tahu benar, mereka akan luput dari hukuman (Anggraeni, 2014, h. 32).

Pascaperistiwa Mei 1998, atas desakan banyak pihak terutama masyarakat sipil yang pro terhadap nilai-nilai kemanusiaan, pemerintah akhirnya bersedia untuk mengakui bahwa pada Mei 1998 telah terjadi kerusuhan yang mengakibatkan penghancuran, pembakaran, dan penjarahan terhadap salah satu etnis di masyarakat. Namun, entah mengapa untuk peristiwa pemerkosaan, pemerintah selalu menyangkalnya (Anggraeni, 2014, hh. 58—59). Salah satunya berasal dari Menhankam dan Panglima ABRI, Jenderal Wiranto yang menyatakan bahwa anak buahnya telah mendatangi sejumlah rumah sakit di Jakarta dan kota lainnya termasuk Singapura untuk menjumpai korban pemerkosaan, tetapi tidak pernah ada sehingga negara menyimpulkan pemerkosaan massal tak pernah terjadi. Dari rentetan peristiwa tersebut, demikianlah Orde Baru lantas menutup segala noda hitam kekuasaannya dalam sejarah panjang bangsa Indonesia pada 22 Mei 1998.

Simpulan

Dalam ranah pendidikan, tidak dapat dimungkiri bahwa pengajaran sejarah di sekolah-sekolah merupakan penceritaan historiografi yang seluruhnya bersumber dari versi tunggal rezim militeristik Orde Baru. Propaganda demikian adalah satu alternatif untuk mengontrol pengetahuan generasi muda sebagai kaum terdidik agar tetap linier dengan kepentingan kekuasaan negara—dalam hal ini kepentingan Orde Baru, sebab pada masa itu sejarah dimanfaatkan untuk kepentingan politik penguasa dan rezim (Adam, 2007, h. 4).

Suatu kewajiban ketika para sejarawan berkeinginan untuk melakukan “pelurusan sejarah” dengan mencoba menghadirkan satu babak penceritaan baru dan berbeda dari yang selama ini militer ciptakan semasa Orde Baru. Satu alasan yang barangkali mesti disepakati adalah agar para generasi muda tidak lagi menjadi ahistoris lalu berkacamata kuda dalam memandang sejarah bangsanya.

Begitu halnya dengan fungsi sastra sebagai suatu keilmuan yang berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan. Selain menghibur karena keindahannya, karya sastra mesti mengandung “didikan” yang berguna bagi para pembaca. Demikianlah makna adagium *dulce et utile* yang dilontarkan Horace. Meski mengurai banyak perdebatan ilmiah, tetapi dua kata di atas betul-betul mampu untuk menjawab makna kehadiran karya sastra di tengah masyarakat. Salah satunya tercermin dalam karya sastra yang digunakan sebagai objek material pada penelitian kali ini, PITM karya Gunawan Budi Susanto.

Dengan menggunakan teori relasi kekuasaan Michel Foucault, ditemukanlah “didikan” yang dimaksud Horace dalam teks cerpen “Mei Hwa”. Data mengenai relasi kuasa yang terdapat dalam cerpen tersebut meliputi relasi kuasa yang bekerja atas pemikiran, meliputi manipulasi agama, kontrol bahasa, hingga stigmatisasi pada etnis Tionghoa, dan relasi kuasa yang bekerja atas tubuh, meliputi objektifikasi tubuh perempuan Tionghoa yang dijadikan hasrat seksual kaum lelaki hingga kontrol atas tubuh individu berdasarkan pada norma sosial yang berlaku.

Dari keseluruhan penelitian yang dilakukan terhadap cerpen “Mei Hwa”, dapat ditarik beberapa kesimpulan atas representasi Orde Baru dalam teks cerpen, yakni (1) negara Orde Baru menggunakan wacana agama, bahasa, hingga lembaga untuk melegitimasi kepentingan kekuasaannya di masyarakat, (2) negara Orde Baru menggunakan kekuatan politik identitas sebagai alat propandanya dalam melanggengkan kekuasaan di Indonesia, dan (3) militer dan aparatur negara selaku instrumen kekuasaan memiliki peran penting dalam setiap peristiwa kelam yang terjadi di negeri ini.

Meminjam pernyataan Adam (2007: 18—19) bahwa Gerakan 30 September, pembantaian 1965, dan penahanan politik di Pulau Buru merupakan trilogi utama karya rezim Orde Baru. Begitu pula dengan peristiwa yang mengiringi keruntuhan rezim Orde Baru pada Mei 1998. Dalam hiruk pikuk politik ini, luput dari pemberitaan media nasional, peristiwa keji yang terjadi selama kerusuhan: perusakan, penghancuran, penjarahan, penganiayaan, hingga pemerkosaan di kawasan-kawasan yang dimukimi etnis Tionghoa di Jakarta pada 13—15 Mei (Anggraeni, 2014, h. 24).

Daftar Pustaka

- Adam, A. W. (2007). *Pelurusan sejarah Indonesia*. Ombak.
- Adji, S. E. P. (2019, April 26). Relasi kekuasaan dalam novel bertema politik pada sastra Indonesia 2000-an [Makalah Seminar]. Seminar Dies XXVI Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma “Peran Pendidikan Humaniora dalam Mewujudkan Demokrasi yang Bermartabat”, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia.
- Anggradinata, L. P. (2016). Konsep kegilaan dan kekuasaan Michel Foucault dalam cerpen “Catatan Harian Orang Gila” karya Lu Xun. *Jurnal Wahana*, 1(13), 4—13. <https://doi.org/10.33751/wahana.v1i13.665>
- Antomo, C. W. P. (2013). Relasi kuasa dalam novel *Merajut Harkat* karya Putu Oka Sukanta [Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta]. Repository Universitas Negeri Yogyakarta. <https://eprints.uny.ac.id/17994>
- Arta, K. S. (2012). Kurikulum dan kontroversi buku teks sejarah dalam KTSP. *Jurnal Media Komunikasi FIS*, 11(1), 153—168.

- Beilharz, P. (2005). *Teori-teori sosial: Observasi kritis terhadap para filosof terkemuka* (Sigit Jatmiko, Penerj.). Pustaka Pelajar. (Karya asli diterbitkan pada 1992)
- Bertens, K. (2001). *Filsafat barat kontemporer: Prancis*. Gramedia.
- Darini, R. (2011). *Kebijakan negara dan sentimen anti-Cina: Perspektif historis*. <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132233219/penelitian/kebijk+neg+thd+etnis+tiong-ISTORIA.pdf>
- Faruk. (2014). *Metode penelitian sastra: Sebuah penjelajahan awal*. Pustaka Pelajar.
- Foucault, M. (2000). *Sejarah seksualitas: Seks dan kekuasaan* (Rahayu S. Hidayat, Penerj.). Gramedia. (Karya asli diterbitkan pada 1976)
- Foucault, M. (2002). *Kegilaan dan peradaban* (Yudi Santosa, Penerj.). Ikon Teralitera. (Karya asli diterbitkan pada 1961)
- Foucault, M. (2017). *Wacana kuasa/pengetahuan* (Yudi Santosa, Penerj.). Narasi. (Karya asli diterbitkan pada 1980)
- Haryatmoko. (2016). *Membongkar tezim kepastian: Pemikiran kritis post-strukturalis*. PT Kanisius.
- Herlambang, W. (2013). *Kekerasan budaya pasca 1965: Bagaimana Orde Baru melegitimasi anti-komunisme melalui sastra dan film* (Wijaya Herlambang, Penerj.). Marjin Kiri. Karya asli diterbitkan pada 2013)
- Izzat, M. (2018). *G-30-S militer dan sejarah kelam etnis Tionghoa*. <http://bem.fikom.unpad.ac.id/G-30-S-militer-dan-sejarah-kelam-etnis-Tionghoa>
- Kamahi, U. (2017). Teori kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi sosiologi politik. *Jurnal Al-Khitabah*, 3(1), 117—133. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Khitabah/article/view/2926>
- Mustakim, M. S., Djatmika, D. & Marmanto, S. (2018). Jenis-jenis tindak tutur ekspresif antologi cerpen *Penjagal Itu Telah Mati* karya Gunawan Budi Susanto. *Jurnal Aksara*, 31(2), 311—324. <http://dx.doi.org/10.29255/aksara.v31i2.318.311-324>
- Matanasi, P. (2017). *Parade paramiliter dalam sejarah Indonesia*. <https://tirto.id/parade-paramiliter-dalam-sejarah-indonesia-cg22>
- Prastiwi, W. & Frecillia, Y. (2014). *Metode studi pustaka*. Diambil pada 8 Juni 2020 dari https://widuri.raharja.info/index.php?title=Metode_Studi_Pustaka
- Munsi, H. (2016). Dari masa lalu ke masa kini: Memori kolektif, konstruksi negara dan normalisasi anti-komunis. *Etnosia: Jurnal Etnografi Indonesia*, 1(1), 30—43. <https://doi.org/10.31947/etnosia.v1i1.998>
- Nurchahyo, D. A. (2016). *Kebijakan Orde Baru terhadap etnis Tionghoa* [Skripsi, Universitas Sanata Dharma]. Repository Universitas Sanata Dharma. <https://repository.usd.ac.id/4471>
- Nurgiyantoro, B. (2002). *Teori pengkajian fiksi*. Gadjah Mada University Press.
- Pengertian penelitian deskriptif kualitatif*. (2016). Diambil pada 8 Juni 2020 dari <https://www.linguistikid.com/2016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif.html>
- Permana, B. (2018). *Etnis Tionghoa pada masa Orde Baru: Studi atas tragedi kemanusiaan etnis Tionghoa di Jakarta (1998)* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta]. Repository UIN Syarif Hidayatullah. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/40767>
- Pertiwi, D. K. (2017). *Mengenal Orde Baru: Atheisme*. Diambil pada 25 Mei 2021 dari <https://dhiandharti.com/mengenal-orde-baru-atheisme/>
- Prahmadhani, D. T. (2007). *Persepsi wanita dewasa dini pengguna produk skin care tentang kecantikan* [Skripsi, Universitas Sanata Dharma]. Repository Universitas Sanata Dharma. <https://repository.usd.ac.id/28150/>

- Robinson, G. B. (2018). *Musim menjagal: Sejarah pembunuhan massal di Indonesia 1965-1966*. Diterjemahkan oleh (Gatot Triwira, Penerj.). Komunitas Bambu. (Karya asli diterbitkan pada 2018)
- Roosa, J. (2017). *Dalih pembunuhan massal: Gerakan 30 September dan kudeta Soeharto* (Hersri Setiawan, Penerj.). Kendi. (Karya asli diterbitkan pada 2006)
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (1994). *Gerakan 30 September: Pemberontakan Partai Komunis Indonesia*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Setiawan, H. (2018). *Kamus Gestok*. Best Publisher.
- Siregar, M. R. (2007). *Tragedi manusia dan kemanusiaan*. Resist Book.
- Susanto, G. B. (2015). *Penjagal itu telah mati*. PATABA Press.
- Syafiuddin, A. (2018). Pengaruh kekuasaan atas pengetahuan (memahami teori relasi kuasa Michel Foucault). *Jurnal Refleksi*, 18(2), 141—155. <https://doi.org/10.14421/ref.v18i2.1863>